

**TESIS**

**KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
PARUH WAKTU DALAM SISTEM  
KEPEGAWAIAN**



**Oleh**

**NOURISMI HAMADA**

**NIM. 2320215310142**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
PARUH WAKTU DALAM SISTEM  
KEPEGAWAIAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh  
NOURISMI HAMADA  
NIM. 2320215310142**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUMM  
UNIVERSITAS LAMBUNG ANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**Judul Tesis : KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA (PPP) PARUH WAKTU DALAM  
SISTEM KEPEGAWAIAN**

**Nama : Nourismi Hamada**  
**NIM : 2320215310142**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

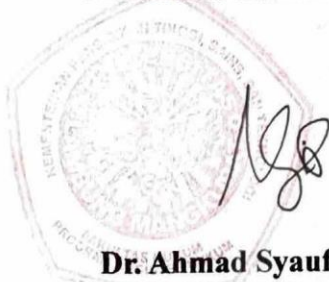
**Pembimbing**



**Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780502 200112 2 002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**

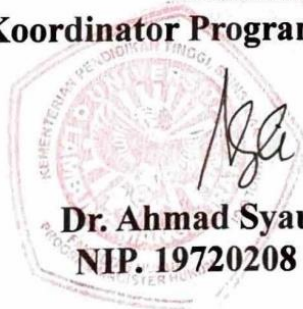
**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing**



**Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.  
NIP. 19780502 200112 2 002**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 14 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Dr. H. Ichsan Anwary S.H., M.H.**  
**Sekretaris : Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**  
**Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.**

## **MOTO**

Segala sesuatu yang kita mulai, harus kita selesaikan juga.

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta ala, Tuhan semesta alam, atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, yang ditujukan bagi seluruh tenaga honorer yang terdampak dengan adanya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nourismi Hamada  
NIM : 2320215310142  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Nourismi Hamada

NIM 2320215310142

**HAMADA, NOURISMI. 2025. KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj Erlina, S.H., M.H., 101 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini membahas kedudukan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem kepegawaian di Indonesia, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan larangan pengangkatan pegawai non-ASN dan mengharuskan penyelesaian penataan tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, namun pengaturannya masih bersifat terbatas dan belum didukung oleh peraturan teknis yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status, ketimpangan hak, serta potensi kekaburan hukum dalam sistem ASN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji secara komprehensif dasar hukum, karakteristik, serta implikasi keberadaan PPPK Paruh Waktu, dengan tujuan untuk merumuskan rekomendasi hukum dan kelembagaan yang dapat memperkuat kepastian hukum serta mewujudkan keadilan dan profesionalitas dalam tata kelola kepegawaian negara.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem kepegawaian di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi hukum kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dalam hal ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai kekaburan hukum. Kekaburan norma hukum yang dimaksud adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai kepastian dan keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum

mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dipilah-pilah dengan terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang bersifat umum (deduksi) lalu kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus (induksi), sehingga diperoleh bahan-bahan hukum yang sebenarnya untuk kemudian disusun sesuai dengan sistematikanya yang akhirnya akan diketahui kedudukan dan implikasi hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

**HAMADA, NOURISMI. 2025. KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing: Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.,** 101 Halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** PPPK, PPPK Paruh Waktu, PNS dan ASN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem kepegawaian di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi hukum kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: **Pertama**, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, namun hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang jelas dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek penting seperti rekrutmen, jam kerja, hak atas jaminan sosial, jenjang karier, serta mekanisme pengakhiran hubungan kerja belum diatur secara spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kelemahan posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dibandingkan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sistem kepegawaian negara. Hasil penelitian yang **Kedua**, Ketidakjelasan pengaturan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem hukum kepegawaian, khususnya ketiadaan norma yang mengatur status, hak, kewajiban, dan mekanisme hubungan kerja, menimbulkan implikasi hukum yang serius berupa ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak-hak dasar pegawai, khususnya bila dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu. Meskipun keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketidakjelasan ini membuka celah terjadinya perlakuan yang timpang dalam hubungan kerja, pengakhiran kontrak, hingga akses terhadap hak-hak dasar pegawai, yang pada akhirnya dapat mengganggu konsistensi sistem administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melemahkan akuntabilitas dan profesionalisme birokrasi.

**HAMADA, NOURISMI. 2025. POSITION OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH PART-TIME WORK AGREEMENTS (PPPK) IN THE PERSONNEL SYSTEM.** Master's Program in Law, Faculty of Law, Graduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.**, 101 Page

#### ABSTRACT

**Keywords :** *PPPK, Part-Time PPPK, PNS and ASN*

*This study aims to determine the position of Government Employees with Part-Time Work Agreements (PPPK) in the personnel system in Indonesia and to determine the legal implications of the position of Government Employees with Part-Time Work Agreements (PPPK).*

*From the results of this study it can be seen that: First, Government Employees with Part-Time Work Agreements (PPPK) are part of the State Civil Apparatus (ASN) based on Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, but until now there are no clear and comprehensive regulations in the legislation. Important aspects such as recruitment, working hours, rights to social security, career levels, and mechanisms for terminating employment relationships have not been specifically regulated, thus creating legal uncertainty and a weak position for Government Employees with Part-Time Work Agreements (PPPK) compared to Government Employees with Full-Time Work Agreements (PPPK) and Civil Servants (PNS) in the state civil service system. The second research finding, the unclear regulation of Part-Time Government Employees with Employment Agreements (PPPK) in the civil service legal system, particularly the absence of norms governing the status, rights, obligations, and mechanisms of employment relations, has serious legal implications in the form of legal uncertainty and weak protection of basic employee rights, especially when compared to Civil Servants (PNS) and Full-Time Government Employees with Employment Agreements (PPPK). Although their existence is recognized in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. This ambiguity opens up opportunities for unequal treatment in employment relations, contract termination, and access to basic employee rights, which ultimately can disrupt the consistency of the State Civil Apparatus (ASN) administration system and weaken bureaucratic accountability and professionalism.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya Tesis ini.

Selain itu dalam penyusunan Tesis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai para pihak yang selalu membantu dalam doa, usaha, semangat dan petunjuk serata bimbingan, dari berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang juga telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan juga memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Istri penulis beserta anak-anak yang telah menjadi rumah yang selalu memberikan tempat untuk pulang dan tempat untuk bersandar.
10. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun.
11. Bapak, Ibu serta kakak di lingkungan BLUD RSUD Ulin Banjarmasin khususnya di bidang hukum dan kemitraan telah memberikan pengalaman pertama dalam dunia kerja sehingga memudahkan dalam dunia kerja dan bahkan berpengaruh dalam penulisan Tesis ini.

12. Bapak, Ibu beserta teman-teman kantor khususnya Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Provinsi Kalsel yang telah memberikan semangat atas lancarnya penulisan Tesis ini.
13. Teman dekat Penulis yang telah memberikan dukungan dan nasihat, membantu penulis baik dalam bertukar pikiran, maupun ketika mengalami kesulitan dalam penulisan Tesis serta menjadi teman yang selalu menemani dalam pengerjaan Tesis ini hingga akhir.
14. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu membantu dan memberi semangat dalam keadaan apapun untuk memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Angkatan 2023) khususnya Kelas B dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Tata Negara, yang selalu memberikan dukungan.

Serta semua orang serta semua elemen kehidupan yang pernah hadir dan berjasa dalam hidup saya, saya ucapkan terimakasih.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan kepada penulis, agar diberikan Ridho serta Rahmat Allah Subhana Watala Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Tesis ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Tesis ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin,        Juli 2025

Nourismi Hamada  
NIM. 2320215310142

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	16
F. Metode Penelitian.....	37
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	43

BAB II KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

A. Kedudukan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia .....	45
B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu: Pengertian, Karakteristik dan Kerangka Regulasi .....	55
C. Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.....	64

BAB III IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU

A. Dasar Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian .....	74
B. Implikasi Hukum terhadap Kepastian Status dan Perlindungan Hak .....	83
C. Arah Pembaruan Hukum dan Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu .....	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

1. 1 Perbandingan Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN)....**Error! Bookmark not defined.**
2. 1 Perbedaan PNS dan PPPK dalam sistem ASN**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR GAMBAR**

2. 1 Prinsip Penanganan Tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (ASN).....	65
---	----